

## **PENGUJIAN HIPOTESIS KUZNETS DI WILAYAH PEMBANGUNAN I JAWA TENGAH**

Oleh: Sri Isnowati

*Dosen STIE STIKUBANK Semarang*

### **ABSTRACT**

*Area development is generally focused on economics development through effort in economic growth. But sometime, it becomes a dilemma between emphasizing economic growth and reducing income imbalance. High growth has no guarantee that income imbalance will be low. This research will test Kuznets hypothesis about the relation between economic growth and income imbalance in Development Area I in Central Java. Williamson index and Entrophy Theil index are used to measure income imbalance. The research result shown that income imbalance in Development Area I in Central Java is increasing. Kuznets hypothesis is effective in Development Area I in Central Java.*

*Key word: Economic Growth, income Imbalance, Williamson Index, Entrophy Theilindex, and Kuznets Hypothesis.*

### **I. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengelola semua sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru serta mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah pembangunan yang bersangkutan. (Blakely, 1989 dalam Mudrajat Kuncoro, 2004 : 110).

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah (Boediono, 1999:1).

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan perwujudan dari kebijakan

pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Kedua undang-undang tersebut, memiliki makna yang sangat penting bagi daerah karena adanya pemberian urusan, sumber daya manusia dan pembiayaan, yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Arsyad (1999:108) memberikan definisi bahwa perekonomian daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah.

Permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan *Gross Domestic Product* ( GDP ), pengurangan kesenjangan pendapatan dan penghapusan kemiskinan. Tetapi kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan dimana pertumbuhan yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa kesenjangan pendapatan akan rendah. Hal ini terbukti dari banyaknya Negara Sedang Berkembang ( NSB ) yang mempunyai pertumbuhan ( sekitar 7 % / tahun ), tetapi tingkat kesenjangan pendapatan dan kemiskinannya juga tinggi. Hal ini menimbulkan tuntutan untuk lebih mementingkan pengurangan kesenjangan pendapatan daripada peningkatan pertumbuhan ekonomi.(Joko Waluyo, 2004,1 ).

Dilihat dari kesenjangan antar wilayah, disparitas ekonomi antar wilayah di Jawa Tengah, yang diukur melalui indeks Williamson, pada tahun 1999 sebesar 0,75, tahun 2000 sebesar 0,78 dan tahun 2001 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 0,76. Sedangkan ketimpangan pendapatan perkapita yang diukur dengan Indeks Gini mengalami kenaikan yaitu 0,2482 pada tahun 2001 menjadi 0,2827 pada tahun 2002. Disparitas ekonomi tersebut apabila tidak mendapatkan prioritas dalam penanganannya diperkirakan dapat menimbulkan konflik sosial antar golongan masyarakat. ( Renstra Prop. Jateng 2003 – 2008).

Adanya ketimpangan pendapatan berbagai sektor ekonomi kemungkinan disebabkan oleh adanya beberapa kendala seperti modal untuk investasi, kualitas sumber daya manusia dan teknologi yang belum memadai. Di samping itu belum teridentifikasinya sektor-sektor ekonomi unggulan untuk dikembangkan yang dapat mendukung laju pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah Pembangunan ( WP ), yang dipandang dari potensi dan struktur ekonomi kewilayahan dapat dimanfaatkan bagi upaya pemerataan pembangunan wilayah ( Perda Propinsi Jawa Tengah No. 8 Tahun 1992

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang diperbaharui dengan Perda Propinsi Jawa Tengah No. 21 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah ). Pengelompokan ini dilakukan sebagai salah satu strategi dasar di dalam melakukan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi wilayah. Diharapkan dengan adanya pembagian ini, masing - masing daerah dalam suatu Wilayah Pembangunan akan saling berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunannya. Sehingga seluruh daerah yang ada didalam wilayah pembangunan tersebut akan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah di Propinsi Jawa Tengah.

Wilayah Pembangunan I yang terdiri dari Kota Semarang sebagai Ibu Kota Jawa Tengah di samping daerah - daerah lain yaitu Kota Salatiga, Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak dan Kab. Grobogan yang juga dikenal dengan sebutan Kedungsapur

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Semakin berkembangnya pembangunan mendorong pemerintah pusat dan daerah berupaya merencanakan semaksimal mungkin dengan mengharapkan tercapainya hasil yang optimal serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah. Dalam mengkaji masalah perencanaan dan pembangunan daerah, maka yang menjadi titik perhatian mendasar adalah mengenai konsep dasar daerah, berbagai studi empiris tentang kegiatan ekonomi ditinjau dari sudut penyebarannya di berbagai daerah.

Bila ditinjau dari aspek ekonomi suatu daerah dapat dibagi menjadi 3 pengertian (Lincoln Arsyad, 1997,273) yaitu : daerah homogen, daerah nodal dan daerah administrasi. Dalam praktek pengertian daerah atau regional yang ketigalah yang sering digunakan.

Hirschman dalam **Teori Linkage Effect dan Industrial Linkage Model** mengemukakan model yang secara eksplisit menjelaskan elemen spasial yang dinamis yang mempunyai tujuan yaitu tentang polarisasi. Menurut Hirschman, sekali pertumbuhan dimulai akan cenderung terkonsentrasi pada sekitar titik awal pertumbuhan yang disebabkan oleh ekonomi eksternal seperti biaya produksi yang lebih rendah, lokasi perusahaan yang berkaitan ekspansi pasar. Daerah lain akan menerima efek positif dan negatif dari wilayah yang menjadi titik pertumbuhan secara geografis. Hirschman menyebut efek yang menguntungkan sebagai *trickling down forces* dan efek merugikan sebagai *polarization effect*. Kemajuan pada kutub pertumbuhan diteteskan ke bawah ke daerah terbelakang melalui migrasi

tenaga kerja yang menurunkan tekanan penduduk di daerah tersebut. Sebaliknya, semakin besar kemampuan berkompetisi diantara industri, kesempatan investasi lebih baik di kutub pertumbuhan dan mengambil sumber daya terbaik dari daerah terbelakang sehingga menyebabkan polarisasi pada titik pertumbuhan tersebut dan menghambat pertumbuhan wilayah *hinterland*-nya.

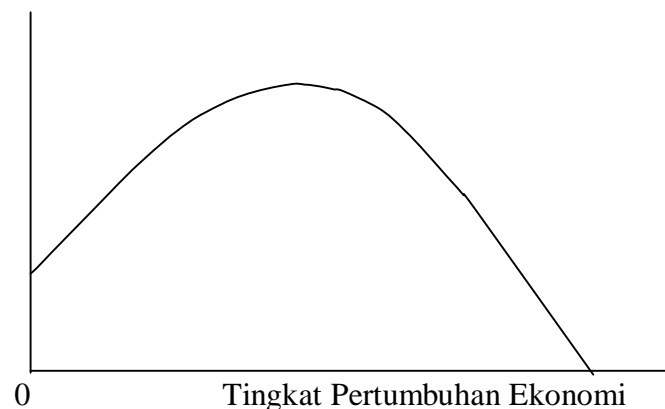
Kesimpulan dari teori Hirschman dalam jangka panjang cenderung terjadi konvergensi pendapatan perkapita . Hal ini disebabkan oleh adanya *diseconomics return to scale effect* karena kemacetan indusri-industri dan ketidakcukupan pasar domestik. Pada akhirnya menurut Hirschman, *trickle down effect* akan cenderung mendominasi *polarization effect* selama komplementaritas kuat antar daerah.(Arsyad,1999)

Hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan *Kuznets Hypothesis*. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun. Indikasi yang diberikan oleh Kuznets di atas didasarkan pada riset dengan menggunakan data *time series* terhadap indikator kesenjangan negara Inggris, Jerman dan Amerika Serikat.

Adapun Hipotesis Kuznets ini biladigambarkan akan nampak seperti pada Gambar 1 sebagai berikut :

Gambar-1  
Kurve “ U “ Terbalik ( Hipotesis Kuznets )

Tingkat Ketimpangan



Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada *phenomena* “Kuznets” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor-sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing – masing sektor. (Ferreira,1994,4 dalam Joko Waluyo,2004).

Penelitian tentang identifikasi sektor ekonomi yang potensial di Indonesia dan beberapa negara lain pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan berbagai pendekatan alat analisis yang berbeda-beda yaitu :

1. Ringkasan studi empiris untuk menguji hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan studi lintas negara dilakukan oleh Benabou ( 1996 ) dan Peroti ( 1995 ). Hasil penelitian ditemukan dampak negatif dari hubungan antara kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi. Deviasi standard yang menurun pada kesenjangan pendapatan menaik untuk GDP perkapita kuartalan terletak antara 0,5 samapi 0,8. Hal ini relevan dan berbeda nyata dalam jangka panjang untuk studi antar negara. Kesimpulan ini memberikan indikasi “*empirical regularity*” yang mirip dengan hipotesis Kuznets.
2. Forbes ( 1997 ) dengan menggunakan *fixed effect* dan *random effect* pada periode 5 tahunan untuk 35 negara, memberikan kesimpulan bahwa hubungan antara kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi adalah positif. Hubungan yang terjadi kuat ( *robust* ) untuk variasi sampel, termasuk perbedaan variable dan cara pengukuran kesenjangan pendapatan dan pembagian sampel menurut negara, nilai awal pendapatan serta tes spesifikasi yang lain.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Definisi Operasional :

- a. Ketimpangan Pendapatan : ketimpangan pendapatan antar daerah di Wilayah Pembangunan I Jawa tengah yang dapat dianalisis dengan mempergunakan indeks ketimpangan regional ( *Regional Inequality* ) yaitu : Index Williamson dan Entropy Theil
- b. Pertumbuhan Ekonomi : Perubahan atas nilai PDRB Riil yang diukur dengan mempergunakan perubahan PDRB masing – masing daerah di Wilayah Pembangunan I menurut harga konstan tahun 1993 dengan rumus :

$$g = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

### **3.2 Metode analisa data**

#### **3.2.1 Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil**

Untuk mengetahui ketimpangan pendapatan digunakan teknik analisa untuk menghitung disparitas atau ketidakmerataan pembangunan / pendapatan regional dengan menggunakan :

1. Indeks Wiliamson

$$V_w = \sqrt{\frac{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot f_i}{N}}$$

Keterangan :  $Y_i$  : pendapatan perkapita masing-masing wilayah  
 $Y$  : pendapatan perkapita wilayah yang lebih luas  
 $f_i$  : jumlah penduduk masing-masing wilayah  
 $N$  : jumlah penduduk wilayah yang lebih besar

Dengan kriteria hasil uji indeks 0 s/d 1 sebagai berikut : (Tulus tambunan, 2004, 146)

- a. 0 s/d 0,5 indeks disparitasnya rendah.
- b. 0,5 s/d 1 indeks disparitasnya tinggi.

2. Indeks Entropi Theil (Mudrajad Kuncoro, 2004, 134)

$$I(y) = \sum (y_j/Y) \times \log [(y_j/Y)/(x_j/X)]$$

Keterangan :  $I(y)$  : Indeks entropi Theil  
 $y_j$  : PDRB per kapita masing-masing wilayah  
 $Y$  : rata-rata PDRB per kapita wilayah yang lebih luas  
 $x_j$  : jumlah penduduk masing-masing wilayah  
 $X$  : jumlah penduduk wilayah yang lebih besar

#### **3.2.2 Korelasi :**

Korelasi adalah istilah dalam statistik yang menyatakan derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih, yang ditemukan oleh Kears Pearson pada awal 1990. Korelasi ini dikenal dengan sebutan Korelasi Pearson Product Moment (PPM). (Husaini Usman, 2003, 197)

Dalam penelitian ini analisis korelasi untuk mengetahui hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dengan variabel ketimpangan pendapatan (diukur dengan indeks Williamson dan indeks entropi theil). Pengukuran korelasi ini untuk menguji hipotesis Kuznets.

Adapun rumus korelasi Product Moment yang digunakan adalah sebagai berikut

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

dimana:

r = nilai korelasi

n = banyaknya sampel

X = pertumbuhan ekonomi ( sebagai variabel independent )

Y = indeks willlamson / indeks theil ( sebagai variabel dependent )

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### 4.1 Ketimpangan Ekonomi antar Daerah WP I Jawa Tengah

Menurut Myrdal ( 1957), perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effect*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effect*) terhadap pertumbuhan daerah. Dalam hal ini akan menyebabkan proses ketidakseimbangan.

Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antar daerah di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah, akan dibahas pemerataan PDRB perkapita antar kabupaten/kota yang dianalisis dengan mempergunakan indeks ketimpangan Williamson dan indeks Entropi Theil. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel-1  
Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil  
Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah  
1983-2003

<i>Tahun</i>	<i>Indeks Williamson</i>	<i>Indeks Entropi Theil</i>	<i>Tahun</i>	<i>Indeks Williamson</i>	<i>Indeks Entropi Theil</i>
1983	0.6003	0.1655	1994	0.7596	0.3081
1984	0.5894	0.1526	1995	0.7811	0.3238
1985	0.5651	0.1263	1996	0.7831	0.3288
1986	0.5495	0.1106	1997	0.8249	0.3600
1987	0.5789	0.1286	1998	0.7596	0.2984
1988	0.5225	0.1024	1999	0.7737	0.3079
1989	0.5776	0.1278	2000	0.7727	0.3042
1990	0.5971	0.1361	2001	0.7984	0.6236
1991	0.6539	0.1650	2002	0.7636	0.6287
1992	0.6606	0.1742	2003	0.7768	0.6301
1993	0.7002	0.2259			

Sumber : Biro Pusat Statistik, beberapa terbitan, yang diolah

Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau makin merata, sebaliknya bila angka yang ada semakin mendekati satu berarti terjadi ketimpangan yang semakin besar.

Tabel 1 menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB perkapita antar daerah kabupaten / kota di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah periode 1983 – 2003. Ketimpangan yang terjadi antar kabupaten / kota di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah pada periode tersebut mengalami peningkatan. Di tahun 1983 angka Indeks Williamson sebesar 0.6003 kemudian mengalami penurunan menjadi sekitar 0.55 dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1990. Namun setelah tahun 1990 nilai Indeks Williamson naik lagi diatas nilai 0.6, hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan semakin besar. Sampai dengan akhir periode penelitian (2003), menunjukkan bahwa ketimpangan semakin melebar . Nilai Indeks Williamson yang paling tinggi terjadi pada tahun 1997 yaitu 0.8249. Ketimpangan yang paling tinggi tersebut disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang dampaknya juga terasa di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah. Menurut Mudrajat, 2004, daerah yang terkena dampak krisis pada umumnya adalah daerah perkotaan. Hal ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan yaitu pada periode tersebut nilai ketimpangan adalah paling tinggi.

Rata-rata angka Indeks Williamson di Wilayah Pembangunan I pada periode penelitian adalah sebesar 0.685179. Angka ini ternyata lebih rendah



dibandingkan dengan rata - rata ketimpangan yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0.691 (Mudrajad Kuncoro , 2004, 135).

Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan suatu daerah selain menggunakan Indeks Williamson juga dapat dipakai Indeks Entropi Theil. Indeks Entropi Theil pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri (Mudrajad Kuncoro, 2002, 87).

Dari hasil analisis yang dilakukan, rata-rata nilai Indeks Entropi Theil pada periode 1983-2003 adalah sebesar 0.2727. Dari hasil yang diperoleh ternyata nilai Indeks Entropi Theil menunjukkan nilai yang semakin mengalami kenaikan. Hal ini berarti bahwa ketimpangan yang terjadi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah adalah semakin membesar atau dengan kata lain semakin terjadi ketidakmerataan. Hal ini yang diperoleh dengan Indeks Entropi Theil adalah sejalan dengan penghitungan dengan Indeks Williamson.

Nilai Indeks Entropi Theil mengalami kenaikan dari tahun 1983 sampai dengan 1997 (0.1655 menjadi 0.3600), tahun 1998 mengalami penurunan, tetapi kemudian naik lagi. Periode 2001 -2003 nilai Indeks Entropi Theil naik kembali dengan kenaikan yang cukup tinggi (0.6301). Indeks ketimpangan Entropy Theil tidak memiliki batas atas atau batas bawah, hanya apabila semakin besar nilainya maka semakin timpang dan semakin kecil semakin merata. (Mudrajad Kuncoro, 2004, 136).

#### **4.2 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan**

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan peningkatan ketimpangan selama periode penelitian. Lebih jauh akan dibahas hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menguji berlakunya hipotesis Kuznets di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah.

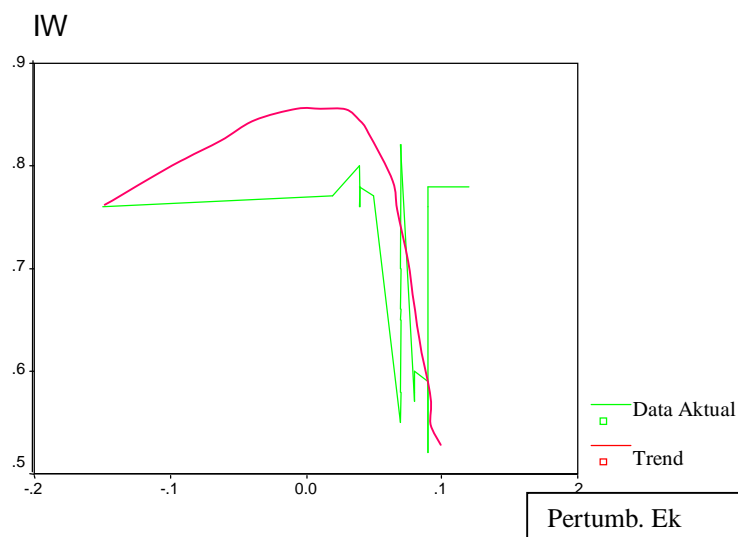
Hipotesis Kuznets dapat dibuktikan dengan membuat grafik antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks ketimpangan. Berikut adalah data pertumbuhan ekonomi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah atas dasar harga tahun konstan 1993 dan indeks ketimpangan baik Indeks Williamson maupun Indeks Entropi Theil

Tabel-2  
Pertumbuhan Ekonomi WP I dan Indeks Ketimpangan  
1983-2003

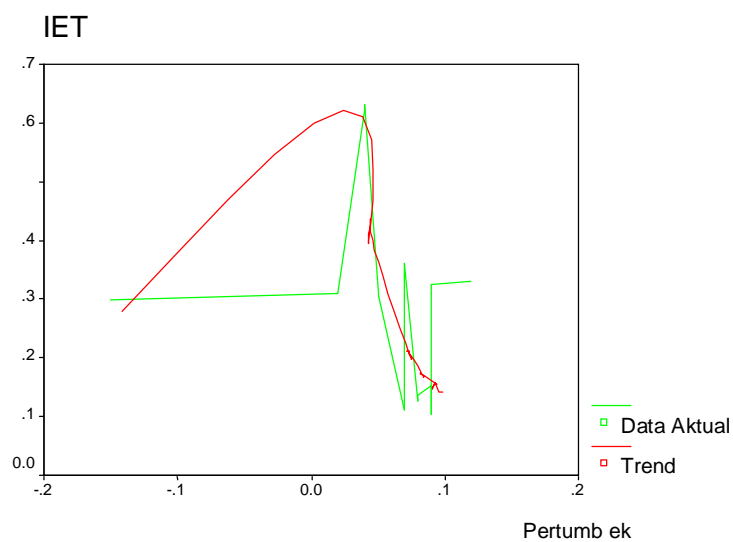
<i>Tahun</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	<i>Indeks Williamson</i>	<i>Indeks Entropi Theil</i>	<i>Tahun</i>	<i>Pertumbuhan Ekonomi</i>	<i>Indeks Williamson</i>	<i>Indeks Entropi Theil</i>
1983		0.6003	0.1655	1994	0.09	0.7596	0.3081
1984	0.09	0.5894	0.1526	1995	0.09	0.7811	0.3238
1985	0.08	0.5651	0.1263	1996	0.12	0.7831	0.3288
1986	0.07	0.5495	0.1106	1997	0.07	0.8249	0.3600
1987	0.08	0.5789	0.1286	1998	-0.15	0.7596	0.2984
1988	0.09	0.5225	0.1024	1999	0.02	0.7737	0.3079
1989	0.07	0.5776	0.1278	2000	0.05	0.7727	0.3042
1990	0.08	0.5971	0.1361	2001	0.04	0.7984	0.6236
1991	0.07	0.6539	0.1650	2002	0.04	0.7636	0.6287
1992	0.07	0.6606	0.1742	2003	0.04	0.7768	0.6301
1993	0.07	0.7002	0.2259				

Gambar 2 dan 3 memperlihatkan hubungan antara indeks ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi. Dari gambar 2 yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks Williamson dan 3 yang menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan indeks Entropi Theil, keduanya menunjukkan bentuk U terbalik. Hal ini berarti bahwa, pada masa awal pertumbuhan terjadinya pertumbuhan ekonomi disertai dengan ketimpangan yang memburuk pada masa berikutnya ketimpangan akan semakin menurun, kemudian akan mengalami kenaikan ketimpangan lagi. Dengan melihat kedua kurva tersebut, keduanya menunjukkan bentuk U terbalik. Hal ini berarti bahwa hipotesis Kuznets dapat dikatakan berlaku di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah pada periode penelitian (1983 – 2003).

Gambar-2  
Kurva Hubungan antara Indeks Williamson dengan Pertumbuhan Ekonomi  
Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah 1983 – 2003



Gambar-3  
Kurva Hubungan antara Indeks Entropi Theil dengan Pertumbuhan Ekonomi  
Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah 1983 – 2003



Sumber : BPS, beberapa terbitan, yang diolah.

Dari hasil analisis korelasi (korelasi pearson) antara pertumbuhan ekonomi dan indeks Williamson didapatkan nilai korelasi sebesar 0,294 dan korelasi pertumbuhan ekonomi dan indeks Entropi Theil didapatkan nilai korelasi 0,248. Namun hubungan (korelasi) diantara keduanya kurang kuat, dan secara statistik hal ini terbukti dengan ditunjukkan bahwa keduanya tidak signifikan pada  $\alpha = 5 \%$

Tabel-3  
Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Williamson

Correlations		
	IW	GROWTH
Pearson Correlation	1.000	.294
	.294	1.000
Sig. (1-tailed)		
IW	.	.104
GROWTH	.104	.
N		
IW	20	20
GROWTH	20	20

Sumber : BPS, berbagai edisi, yang diolah

Tabel-4  
Korelasi antara Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Entropi Theil

Correlations		
	IET	GROWTH
Pearson Correlation	1.000	.248
	.248	1.000
Sig. (1-tailed)		
IET	.	.146
GROWTH	.146	.
N		
IET	20	20
GROWTH	20	20

Sumber : BPS, berbagai edisi, yang diolah

## V. SIMPULAN

1. Terjadinya kecenderungan peningkatan nilai Indeks entropi Theil maupun nilai Indeks Williamson mengandung arti bahwa ketimpangan yang terjadi di Wilayah pembangunan I Jawa Tengah semakin membesar atau semakin tidak merata.

- 2 .Hipotesis Kuznets yang menunjukkan hubungan antara ketimpangan dengan pertumbuhan ekonomi yang berbentuk kurva U terbalik ternyata berlaku di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah . Hal ini terbukti dari hasil analisis trend (baik yang mempergunakan indeks Williamson dengan pertumbuhan maupun indeks Entropi Theil dan pertumbuhan) dan nilai korelasi Pearson. Bagian dari Hipotesis Kuznets yang terjadi di Wilayah Pembangunan I Jawa Tengah pada periode penelitian adalah di kurva Kuznets yang menaik yang artinya terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi disertai dengan naiknya ketimpangan

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Blakely, EJ & Bradshaw, TK, 2002, **Planning Local Economic Development, Theory and Practice**, Sage Publications, California.
- Husaini Usman dan R. Purnomo Setiadi Akbar, 2003, **Pengantar Statistika**, Bumi Aksara, Jakarta
- J Supranto, 2000, **Statistik, Teori dan Aplikasi**, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Joko Waluyo, 2004, **Hubungan Antara Tingkat Kesenjangan Pendapatan Dengan Pertumbuhan Ekonomi : Suatu Studi Lintas Negara**, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 9 No. 1 Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Lincoln Arsyad, 1997, **Ekonomi Pembangunan**, YKPN, Yogyakarta
- Lincoln Arsyad, 1999, **Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah**, Edisi I, BPFE, Yogyakarta.
- Masykur Riyadi, 2000, **Implikasi UU No. 22 / 1999 dan UU No. 25 / 1999 terhadap Pembangunan Daerah** : Strategi Pengembangan Potensi Daerah, Perencanaan Pembangunan, No. 19.
- Mudrajad Kuncoro, 1997, **Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan**, UPPAMP YKPN, Yogyakarta
- Mudrajad Kuncoro, 2002, **Analisis Spasial dan Regional, Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia**, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Mudrajad Kuncoro, 2004, **Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang**, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, 2003, **Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Rencana Srategis (Renstra) Propinsi Jawa Tengah 2003 – 2008.**

Robinson Tarigan, 2004, **Ekonomi Regional**, Bumi Aksara, Jakarta

Sadono Sukirno, 1985, **Ekonomi Pembagunan , Proses , Masalah dan Dasar Kebijaksanaan**, FEUI, Bisma Grafika, Jakarta

Todaro, MP dan Smith, Stephen C, 2004, **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**, Penerbit Erlangga, Jakarta

Tulus Tambunan, 2003, **Perekonomian Indonesia**, Ghalia Indonesia, Jakarta